



## Dewan Sidak Pasar Kidul Soroti Pembuatan Sekat Baja di Lantai Dua

Bangli (Bali Post)-

Komisi III DPRD Bangli sejak beberapa hari terakhir terus melakukan sidak ke sejumlah proyek. Setelah sebelumnya menyidak pembangunan puskesmas dan rumah sakit, Kamis (19/11) kemarin komisi yang diketuai Ni Nengah Dwi Madya Yani menyambangi proyek pembangunan Pasar Kidul. Dalam sidak tersebut, dewan menyoroti kondisi pasar yang kumuh. Tak hanya itu, dewan juga mempertanyakan soal pembuatan sekat untuk pedagang kain di lantai dua pasar setempat.

Sidak yang dilakukan anggota Komisi III berlangsung pada pagi hari. Ada pun anggota Komisi III yang ikut dalam sidak yakni Satria Yuda, Wayan Subagan, Dewa Gde Oka, Sajiboga dan beberapa anggota lainnya. Dalam sidak tersebut, Madya Yani langsung menyorot masalah kondisi Pasar Kidul yang dinilainya kumuh.

Menurut Madya Yani, untuk menjaga kebersihan pasar seharusnya semua instansi ikut terlibat, tidak hanya Disperindag namun juga Dinas Tata Kota, dan Dinas PU. Bukan justru saling melempar tanggung jawab. Selain kebersihan, dewan juga menyoroti tentang pembuatan sekat untuk ratusan pedagang kain di lantai dua. Dengan bahan baja ringan yang dipasang dengan baut, dewan meragukan sekat tersebut akan bisa bertahan lama.

Dalam kesempatan tersebut, Kabid Disperindag Dewa Kantor menjelaskan, untuk pedagang kain di lantai dua

pihaknya hanya membuat sekat dari baja. Sedangkan dinding termasuk *roofing door*nya akan diserahkan kepada pedagang. Ini dikarenakan anggaran yang dipergunakan terbatas, yakni Silpa tahun 2014 senilai Rp 130 juta.

Karena keterbatasan tersebut, jumlah sekat yang dibuat saat ini pun diakuinya tidak sesuai dengan jumlah pedagang yang akan masuk. Menanggapi apa yang disampaikan Dewa Kantor, anggota Komisi III Wayan Subagan berpendapat untuk keseragaman, dinding sekat seharusnya dibuatkan oleh Disperindag. Pihaknya khawatir dengan diberikannya kebebasan tersebut, nantinya penataan pasar akan kumuh.

"Takutnya nanti ada yang menggunakan triplek, ada juga yang pakai terpal. Kan nampak kumuh nantinya," ujarnya. Politisi asal Tembuku ini pun mengingatkan, agar dalam serah terima hasil pekerjaan nantinya Disperindag tidak



Sambungan - - - -



Bali Post/ina

**SIDAK - Komisi III saat sidak di Pasar Kidul.**

menerima dalam kondisi asal-asalan. Hasil pekerjaan rekanan harus dalam kondisi bersih.

Sementara itu, Kepala Disperindag Bangli Nengah Sudibia saat dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, pada lantai

dua Pasar Kidul, jumlah pedagang kain yang akan dimasukkan sebanyak 217. Pihaknya mengakui jumlah pedagang kain yang direncanakan menemani pasar pada Desember mendatang jumlahnya lebih banyak dibanding jumlah sekat

yang dibuat saat ini. "Jumlah sekat yang dibuat saat ini baru 197 buah," terangnya. Terkait kekurangan itu, pihaknya telah merencanakan untuk menambah sekat di tahun anggaran 2016 mendatang. (kmb40)



# Dewan Permasalahkan Tambahannya Insentif Aparatur

## Pengesahan RAPBD Terancam Molor

Mangupura (Bali Post) -

Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Badung 2016 terancam molor. Kondisi ini lantaran wakil rakyat di DPRD Badung masih memperlmasalahkan penambahan insentif aparatur, selain tambahan anggaran Rp 30 miliar yang tak tercantum dalam KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS).

Menurut anggota Komisi IV DPRD Badung Putu Parwata, sepanjang memenuhi ketentuan normatif seperti keselarasan KUA PPAS dan RKPD serta persetujuan dewan terkait dengan penambahan insentif aparatur, pengesahan RAPBD 2016 tidak akan terganjal. "Program-program yang dipasang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan transparan. Jika tidak memenuhi ketentuan normatif di atas, jangan kambing-hitamkan DPRD tak mau membahas RAPBD Badung 2015," ungkap calon PAW Ketua DPRD Badung itu, Kamis (19/11) kemarin.

Jika tak memenuhi ketentuan normatif di atas, anggota Fraksi PDI Perjuangan tersebut tak menjamin pembahasan RAPBD berjalan lancar. Dia menunjuk tambahan anggaran Rp 30 miliar yang tak tercantum dalam KUA PPAS, harus dijelaskan secara terbuka. Hingga kini,

anggaran tersebut belum dijabarkan. "Bisa saja terganjal jika tak memenuhi ketentuan normatif di atas," tegasnya.

Demikian juga dengan tambahan insentif aparatur, wajib mendapat persetujuan DPRD. "Selama ini, persetujuan ini belum pernah dilaku-

kan dan eksekutif terkesan semaunya saja," katanya.

Ditanya mengenai kemungkinan ada sanksi Dewan dan eksekutif tak menerima gaji hingga empat bulan jika APBD 2015 tak disahkan

hingga 30 November mendatang, Parwata menampiknya. "Sanksi itu tetap ada, cuma dilihat siapa yang menghambat. Jika penyebabnya ada di eksekutif, hanya eksekutiflah yang menerima sanksi. De-

mikian pula jika hambatannya dilakukan oleh Dewan, Dewan-lah yang menerima sanksi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pada 2016 mendatang tunjangan aparatur di Badung

mengalami peningkatan menjadi Rp 408 miliar atau naik Rp 97 miliar dibandingkan tahun 2015 yang mencapai Rp 311 miliar. Ini tentu saja angka yang sangat fantastis. (kmb27)



**Terganjil Aturan**

# Hibah Rp 14 Miliar Belum Tersalurkan

Denpasar (Bali Post) -

Adanya aturan baru untuk mencairkan dana bantuan hibah kepada masyarakat yakni hanya untuk yang berbadan hukum, berdampak pada realisasi dana hibah. Buktinya, untuk dana hibah yang dianggarkan pada 2015 ini dipastikan banyak yang akan tidak terserap. Mengingat, sampai akhir tahun ini masih ada dana Rp 14 miliar lebih yang tidak bisa disalurkan. Yang bisa disalurkan kemungkinan hanya sekitar Rp 7,65 miliar lebih.

Hal ini terungkap dalam rapat kerja Badan Anggaran DPRD Denpasar dengan tim anggaran eksekutif di ruang sidang, Kamis (19/11) kemarin. Rapat kerja yang dipimpin Ketua DPRD Denpasar I Gusti Ngurah Gede didampingi Wakil Ketua Wayan Mariyana Wandira dan Sekda AAN Rai Iswara, dihadiri anggota Badan Anggaran DPRD dan sejumlah pimpinan SKPD penghasil di lingkungan Pemkot Denpasar.

Dalam rapat kerja tersebut, lebih banyak mengemuka tentang pencairan dana hibah untuk masyarakat. Karena sampai saat ini, pusat belum memberikan kejelasan tentang siapa yang bisa diberikan dana hibah. Bahkan, beberapa kali pihak eksekutif melakukan koordinasi dengan pusat, namun belum ada jawaban yang jelas.

Ketua Fraksi PDI-P Kadek Agus Arya Wibawa mengusulkan agar dicarikan pola lain untuk menyalurkan dana hibah ini kepada masyarakat. Terlebih, masih banyak usulan dari masyarakat agar mendapat dana bantuan hibah ini. "Bagaimana bila pencairan dana hibah ini dilakukan seperti bantuan bedah rumah," kata politisi asal Denpasar Selatan ini.

Keluarnya Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, pasal 298 ayat (5) huruf d, mengakibatkan pemerintah daerah termasuk Pemkot Denpasar kesulitan mengalokasikan dana hibah. Kadek Agus Arya Wibawa meminta eksekutif untuk mencari celah dari aturan tersebut, misalnya pencairan batuan dana hibah agar tidak terpaku pada dana *cash*. "Misalnya bedah rumah. Ini menggunakan pola dana hibah. Kalau ini (pencairan) belum pasti, maka tahun 2016 tidak bisa ada program bedah rumah, termasuk pula perbaikan pasar-pasar desa," kata politisi PDI-P ini.

Terkait hal ini, Sekda Rai Iswara mengatakan, APBD yang dirancang sudah menjadi sandaran dalam menyusun segala program. "Ke depan, kita bahas lagi dengan mensinkronkan terhadap aturan-aturan yang masih menjadi perdebatan. Dalam penyusunan APBD ini, sebelumnya kami juga sudah berkoordinasi dengan BPK, provinsi termasuk pula intip-intip kabupaten lain untuk mendapat gambaran yang lebih jelas," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) per 18 Agustus 2015 bernomor 900/4627/SJ yang berisi penajaman Pasal 298 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah guna memberikan kemudahan bagi pemberian hibah dan bansos. Namun, dewan Denpasar masih ragu. Keraguan ini muncul, mengingat pihak penerima bansos dan hibah ini harus berbadan hukum. Sementara selama ini, seperti pengempon pura, sekaa truna, dan kelompok masyarakat lainnya tidak dalam bentuk badan hukum. Hal inilah yang menyulitkan bansos dan hibah dicairkan. (kmb12)

Edisi : Jumat, 20 November 2015

Hal : 2